

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep *Local Strongman*

Orang kuat lokal (*local strongman*) adalah seseorang yang identik memiliki kelebihan atau keahlian dalam memengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain, yang mereka miliki secara ilmiah (Paraisu, 2016). Konsep *local strongman* juga merujuk pada figur-figur lokal yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik dan sosial di tingkat lokal/komunitas. Joel S. Migdal dalam bukunya *Strong Societies and Weak States* (1988) menjelaskan bahwa keberadaan *local strongman* muncul dalam konteks negara yang kelembagaan formalnya lemah, sehingga membuka ruang bagi aktor-aktor non-negara untuk memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya di tingkat lokal.

Local strongman ini identik sekali dengan elit, dimana elit merujuk pada sekumpulan orang yang berisikan orang-orang superior yang mampu menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan atau yang sedang berkuasa, begitupun *local strongman*. *Local strongman* sering kali memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi, jaringan sosial, atau kekuatan simbolik yang memungkinkan mereka melakukan mobilisasi dukungan politik dan memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk pada tingkat lokal (Handoko et al., 2020).

Local strongman ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik desa, meskipun

mereka tidak selalu menjabat secara formal dalam struktur pemerintahan. Menurut Hadiz (2022), *local strongman* muncul sebagai figur yang memiliki modal sosial, ekonomi, dan simbolik yang cukup kuat untuk memengaruhi arah politik lokal, termasuk pada ranah pemilihan kepala desa. Fenomena *local strongman* biasanya bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha lokal, tokoh agama, mantan kepala desa, anggota DPRD, atau bahkan elite organisasi masyarakat (ormas). Mereka seringkali menjadi patron dalam hubungan patron-klien karena memiliki kapasitas untuk menyediakan bantuan atau dukungan logistik kepada kandidat kepala desa. Dalam banyak kasus, dukungan dari *local strongman* dapat menentukan kemenangan kandidat karena mereka memiliki jaringan sosial yang luas dan kekuatan untuk memobilisasi massa pemilih.

Menurut Joel Migdal dalam Handoko (2020), para orang kuat lokal (*local strongman*) mampu melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini oleh masyarakat sebagai strategi. Selain itu, *local strongman* ini berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparaturnya sehingga menyebabkan posisi pemerintah lemah. Melalui adanya demokratisasi dan desentralisasi, *local strongman* semakin mendapatkan kesempatan untuk mengendalikan kekuasaan yang ada di pemerintahan lokal. *Local strongman* selalu berupaya untuk memastikan bahwa aktor politik lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya agar kebijakan resmi menguntungkan bisnis dan posisinya.

Dalam beberapa kajian ilmiah, Joel Migdal menjelaskan bahwa *local strongman* dapat dipahami dari tiga argumentasi yang saling terkait. Pertama, *local strongman* merupakan elit atau tokoh lokal yang memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepala daerah maupun birokrasi lokal dalam konteks relasi kekuasaan yang disebut sebagai *triangle of accommodation*, yaitu hubungan kompromi antara penguasa formal, birokrat, dan elit lokal. Kedua, *local strongman* juga menjalankan fungsi sebagai agen kontrol sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam distribusi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan publik. Dimensi ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep personalisme, klientelisme, dan hubungan patron-klien sebagaimana dikemukakan oleh John T. Sidel. Ketiga, *local strongman* menurut Migdal adalah aktor yang memiliki kemampuan untuk menguasai wilayah atau bahkan mengendalikan kebijakan negara atau pemerintahan lokal (Ridho, 2023). Mereka mampu memengaruhi arah kebijakan publik dan dinamika politik, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah maupun dalam menentukan keputusan strategi di tingkat lokal.

Migdal (1988) dalam bukunya mengidentifikasi tiga variabel utama yang menjadi karakteristik dari seorang *local strongman*, yaitu:

1. Penguasaan Wilayah dan Negara (Akses terhadap Sumber Daya)

Lokal strongman memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, atau sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sumber daya ini dapat berupa bahan kebutuhan pokok seperti sembako, fasilitas publik seperti listrik dan air bersih, atau bentuk bantuan lain yang menjadi kebutuhan strategis masyarakat. Akses terhadap sumber daya ini memungkinkan mereka untuk memobilisasi dukungan dan membangun pengaruh.

2. Kontrol Sosial (Kekuatan dalam memengaruhi Kebijakan Lokal atau Keputusan Masyarakat)

Local strongman mampu memengaruhi arah kebijakan desa, baik secara langsung melalui posisi formal maupun secara informal melalui tekanan sosial, ekonomi, atau kedekatan personal dengan pemegang kekuasaan formal seperti kepala desa. Pengaruh ini menjadikan mereka sebagai aktor kunci dalam menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap program pemerintah, proyek infrastruktur, atau bentuk bantuan lainnya.

3. Legitimasi dan Dukungan Sosial (Kemampuan Membentuk Loyalitas dan Jejaring Sosial)

Local strongman memiliki jejaring sosial yang luas dan loyalitas dari warga, relawan, atau simpatisan yang setia. Loyalitas ini dibangun melalui hubungan patron-klien yang bersifat timbal balik, yaitu dimana mereka memberikan bantuan atau akses terhadap sumber daya, dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan dukungan politik, kepercayaan, atau pengaruh sosial. Jejaring ini sering kali bersifat informal namun sangat kuat dalam menentukan arah politik lokal.

Melalui pemahaman ketiga variabel ini, peran *local strongman* dalam kontekstasi politik desa menjadi terlihat signifikan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pendukung pasif tetapi juga sebagai penggerak utama dalam proses mobilisasi massa dan distribusi pengaruh politik. Dalam penelitian ini, konsep *local strongman* digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor-aktor lokal yang mendukung Elin Herlina dalam Pilkada Cikoneng tahun 2014 dan 2021.

Mengacu pada konsep yang dikemukakan Joel S. Migdal (1988), *local strongman* dipahami sebagai individu atau kelompok lokal yang memiliki kapasitas mengakses sumber daya, memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa, serta membentuk loyalitas dan jejaring sosial dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya *local strongman* tidak berdiri sendiri, melainkan berjejaring dengan aktor lain dan membentuk lingkaran kekuasaan yang bersifat oligarkis. Oligarki ini dipahami sebagai konsentrasi kekuasaan pada segelintir elit yang mampu mengendalikan sumber daya strategis dan memengaruhi kebijakan (Winters, 2011). Pada konteks desa, relasi kepala desa dengan *local strongman* tidak hanya mencerminkan hubungan *patron-klien*, tetapi juga menunjukkan pola oligarki lokal, dimana sejumlah aktor memiliki pengaruh yang dominan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, *local strongman* dapat dilihat bukan hanya sebagai patron individual, tetapi juga sebagai bagian dari struktur oligarki yang bekerja di tingkat desa, yang kemudian dimediasi melalui praktik *patron-klien* sebagaimana dijelaskan oleh James C. Scott.

2.1.2 Teori Patron-Klien

Teori *patron-klien* yang dikemukakan oleh James Campbell Scott merupakan salah satu pendekatan penting dalam menganalisis relasi kekuasaan di tingkat lokal, terutama pada konteks politik elektoral seperti pada pemilihan kepala desa. James Scott (1972) pada artikel yang dibuatnya dengan judul “*Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*”, mendefinisikan *patron-klien* sebagai hubungan asimetris antara dua pihak dengan status sosial-ekonomi yang berbeda dimana “patron” yang berarti pihak superior (yang lebih kuat secara ekonomi dan

sosial) yang memiliki kontrol atas sumber daya baik itu ekonomi, politik hingga sosial, dan "klien" ialah pihak inferior (pihak yang lebih lemah) yang menerima alokasi sumber daya tersebut sebagai bentuk perlindungan/keuntungan.

Scott mendeskripsikan hubungan patron-klien sebagai bentuk hubungan sosial yang bersifat pribadi dan tidak setara antara dua individu, dimana patron yang memiliki kekuatan atau sumber daya memberikan perlindungan, bantuan, atau akses terhadap kekuasaan kepada klien. Sebagai gantinya, klien menunjukkan loyalitas, dukungan politik, maupun jasa lainnya kepada patron. Hubungan ini bersifat timbal balik tetapi tidak setara (asimetris), karena terjadi antara pihak yang memiliki posisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda¹¹. Scott menekankan bahwa relasi ini bersifat personal, dibangun melalui kedekatan emosional, kekerabatan, atau loyalitas dan sering kali berlangsung dalam jangka panjang. Poin penting pada kelompok patron-klien ialah hubungan kekuasaan, di mana patron mempunyai kekuasaan atas klien. Karena patron memiliki kemampuan, status sosial, kekayaan, dan pengaruh dalam masyarakat dibandingkan kliennya. Dengan sumber daya yang dimilikinya ini patron bisa memengaruhi klien untuk membantunya dan klien akan membalasnya dengan memberi dukungan dan pelayanan kepada patron (Soleman & Salim, 2022).

Pada praktiknya, hubungan patron-klien sering muncul dalam bentuk pertukaran dukungan politik dengan bantuan material atau akses terhadap sumber daya. Misalnya, patron memberikan dukungan logistik dan jaringan guna

¹¹ Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113

membantu kemenangan calon kepala desa, ketika calon tersebut menang, klien akan memberikan akses terhadap proyek, jabatan, maupun keputusan strategis desa kepada patron. Pola ini mencerminkan politik patronase yang beroperasi dalam demokrasi lokal dan dapat memengaruhi struktur kekuasaan di tingkat desa.

Penelitian ini menggunakan teori patron-klien untuk menganalisis hubungan antara Elin Herlina sebagai calon kepala desa dengan para *local strongman* yang memberikan dukungan politik kepada Elin pada Pilkada Cikoneng tahun 2021. Untuk menganalisis fenomena ini, diperlukan sejumlah indikator yang dapat menunjukkan bagaimana praktik patronase ini dijalankan. Indikator-indikator ini adalah:

1. Ketimpangan Status Sosial dan Ekonomi

Menurut Scott, relasi patron-klien selalu terbentuk di antara dua pihak yang tidak setara secara ekonomi dan sosial. Patron memiliki kelebihan dalam hal kekuasaan, sumber daya, atau status sosial, yang memungkinkan dia menawarkan perlindungan atau bantuan kepada klien. Pada penelitian ini, indikator akan digunakan untuk melihat apakah para *local strongman*, misalnya pengusaha, tokoh agama, hingga anggota DPRD memiliki posisi sosial-ekonomi yang lebih dominan dibandingkan dengan Elin Herlina sebelum atau selama pencalonan. Hal ini yang akan menjadi dasar terjalinnya relasi patron-klien.

2. Pertukaran Dukungan dan Imbalan (*Reciprocity*)

James Scott menjelaskan jika hubungan patron-klien bersifat timbal balik, di mana patron memberikan dukungan berupa perlindungan, logistik, maupun

pengaruh dan klien akan membalasnya dengan loyalitas atau dukungan politik. Peter M. Blau dalam Rokhmah & Handoyo (2015) menjelaskan bahwa tidak semua manusia dididik oleh pertimbangan pertukaran sosial, tetapi hanya sebagian besarnya saja. Terdapat 2 syarat yang perlu dipenuhi oleh mereka yang akan melakukan pertukaran sosial, diantaranya harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang akan di capai melalui interaksi dengan orang lain dan harus bertujuan guna memperoleh sarana untuk mencapai tujuan tujuan tersebut. Dalam hal ini, indikator ini akan digunakan untuk melihat bentuk konkret pertukaran antara Elin Herlina dan para pendukung kuatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan contoh misalnya dukungan kampanye dari *local strongman* dibalas dengan pemberian akses terhadap proyek desa atau peran dalam pemerintahan desa setelah dirinya terpilih.

3. Keterkaitan Pribadi

Salah satu karakteristik penting dalam teori James Scott ialah bahwa hubungan patron-klien tidak bersifat institusional, melainkan personal dan informal. Hubungan ini dibangun atas dasar kedekatan, rasa saling percaya, bahkan kekerabatan. Pada konteks penelitian ini, indikator ini akan digunakan untuk mengkaji apakah relasi antara Elin dan *local strongman* yang mendukungnya tidak dibentuk secara resmi. Misalnya bukan bagian dari suatu struktur partai, tetapi melalui kedekatan pribadi dan hubungan sosial di masyarakat.

4. Jangka Panjang dan Fleksibel

James Scott juga menekankan bahwa hubungan ini bersifat berkelanjutan dan tahan lama, tidak hanya untuk satu momen politik. Ini menandakan adanya kekuatan yang berulang dan penguatan hubungan di luar masa kampanye. Indikator ini akan digunakan pada penelitian ini untuk menelusuri apakah relasi dukungan antara Elin Herlina dan *local strongman* telah berlangsung sejak Pilkades 2014 dan kemudian berlanjut ke Pilkades 2021, serta apakah hubungan tersebut masih berjalan selama masa kepemimpinan Elin.

5. Pengaruh dalam Struktur Politik

Scott menunjukkan bahwa patron memiliki kapasitas untuk mengarahkan atau mempengaruhi proses politik melalui relasi mereka. Dalam hal ini, klien (Elin Herlina) yang mendapatkan dukungan dari patron (para *local strongman*) bisa membuka jalan bagi patron untuk ikut menentukan arah kebijakan atau mendapatkan keuntungan setelah pemilihan. Indikator ini akan digunakan untuk melihat sejauh mana tokoh-tokoh pendukung Elin mendapatkan akses terhadap posisi strategis, proyek desa, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah desa setelah Elin menjabat kembali sebagai kepala desa.

Kelima indikator di atas akan digunakan sebagai alat analisis utama untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana praktik politik patronase membentuk relasi kuasa antara Elin Herlina dengan *local strongman* sehingga dapat berpengaruh pada proses dan hasil Pemilihan Kepala Desa Cikoneng tahun 2021.

2.1.3 Konsep Patronase dan Klientelisme

Klientelisme adalah salah satu praktik politik yang berjalan beriringan dengan hubungan patron-klien. Perbedaannya, hubungan patron-klien menekankan pada relasi timbal balik antara dua pihak dengan ketimpangan status sosial-ekonomi, sedangkan klientelisme ini lebih menyoroti bentuk pertukaran material secara langsung yang terjadi antara aktor politik dan individu atau kelompok yang memberikan dukungan politik (Nastain & Nugroho, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maczak (2017) menjelaskan bahwa patronase dan klientelisme memiliki kaitan erat dengan feodalisme yang melibatkan majikan di posisi atas dengan bawahan. Patronase di definisikan sebagai distribusi sumber daya material guna mencapai tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus sumber daya material ini didistribusikan melalui jaringan klientelisme yang berbasis pada relasi kekuasaan personal. Sedangkan klientelisme di definisikan sebagai relasi kekuasaan personal dengan status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan mereka yang memiliki status sosial yang lebih rendah (klien) dalam ikatan timbal balik.

Definisi lain, patronase dapat dipahami sebagai pemberian uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari pribadi kandidat yang kemudian di distribusikan dengan melalui mekanisme tertentu kepada pemilih (Andhika, 2017). Sedangkan menurut Kitschelt dan Wilkinson dalam Agustino (2022), klientelisme adalah “pertunjukan kontingen antara barang atau jasa material dan dukungan elektoral, dimana barang atau jasa tersebut diberikan secara pribadi dan bersyarat”. Dalam konteks ini, patron memberikan bantuan atau fasilitas

tertentu kepada klien dengan harapan mendapatkan dukungan politik, seperti suara dalam pemilihan umum (Agustino et al., 2022). Di Indonesia sendiri, praktik klientelisme sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, bantuan sembako, proyek pembangunan, atau janji akses terhadap layanan publik. Fenomena ini menjadi bagian dari dinamika politik lokal, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades), dimana hubungan personal dan pertukaran material memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan.

Dalam hal ini, konsep klientelisme akan menganalisis praktik-praktik pertukaran material yang terjadi antara calon kepala desa dan *local strongman* dengan masyarakat. Misalnya, melalui pemberian token listrik gratis, bantuan logistik, atau janji proyek pembangunan sebagai imbalan atas dukungan politik terhadap calon kepala desa. Analisis ini diharapkan akan membantu memahami bagaimana hubungan patron-klien terbentuk dan berfungsi dalam konteks Pilkades di Desa Cikoneng.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari konsep *local strongman* sebagaimana dijelaskan oleh Joel S. Migdal (1988) dalam bukunya *Strong Societies and Weak States*. Migdal menjelaskan bahwa *local strongman* adalah aktor lokal yang memiliki kapasitas mengakses sumber daya, memengaruhi keputusan lokal, dan membangun loyalitas sosial di tengah lemahnya kapasitas negara. Dalam konteks Pilkades, *local strongman* memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan dan mengarahkan preferensi politik warga melalui jejaring sosial, kekuatan ekonomi, dan relasi kultural.

Konsep *local strongman* Migdal digunakan dengan mengacu pada tiga indikator utamanya, yaitu: 1) Kemampuan mengakses dan mengelola sumber daya (seperti logistik kampanye, bantuan material, hingga proyek desa); 2) Kekuatan dalam memengaruhi kebijakan lokal atau keputusan masyarakat, termasuk dalam proses Pilkades dan pemerintahan desa; dan 3) Kemampuan membentuk loyalitas dan jejaring sosial, baik melalui pendekatan kultural maupun relasi personal dengan masyarakat dan elite desa. Ketiga indikator tersebut menjadi landasan utama untuk mengidentifikasi siapa saja aktor yang dapat dikategorikan sebagai *local strongman* dalam Pilkades Cikoneng 2021, serta bagaimana mereka berperan dalam mendukung kemenangan kandidat.

Untuk memahami mekanisme hubungan antara *local strongman* dan kandidat, penelitian ini menggunakan teori patron-klien yang dikemukakan oleh James C. Scott (1972) sebagai lensa analisis tambahan. Teori ini menjelaskan hubungan timbal balik antara dua aktor dengan ketimpangan kekuasaan, di mana seorang patron memberikan sumber daya, perlindungan, atau akses kekuasaan kepada klien, sementara klien membalasnya dengan dukungan politik, kesetiaan, atau bentuk lainnya. Hubungan ini bersifat personal, informal, berlangsung jangka panjang, dan fleksibel. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana relasi kekuasaan antara Elin Herlina dan aktor-aktor lokal (*local strongman*) dibentuk dan dijaga selama proses Pilkades Cikoneng tahun 2021.

Hubungan patron-klien ini dianalisis dengan lima indikator dari Scott, yaitu: 1) Ketimpangan status sosial dan ekonomi antara patron dan klien; 2) Pertukaran dukungan dan imbalan (*reciprocity*) secara timbal balik; 3) Keterkaitan pribadi

(personal bond) di antara actor; 4) Relasi yang berlangsung jangka panjang dan fleksibel; dan 5) Pengaruh dalam struktur politik lokal yang dimiliki oleh patron terhadap klien maupun komunitasnya.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada konsep patronase dan klientelisme untuk menjelaskan bentuk konkret pertukaran yang terjadi dalam relasi tersebut, seperti pembagian sembako, pemberian listrik gratis, atau proyek desa. Patronase di sini dipahami sebagai distribusi sumber daya oleh patron kepada klien untuk memperoleh dukungan politik, sedangkan klientelisme menggambarkan sifat transaksional dari pertukaran tersebut.

Dengan memadukan konsep *local strongman* Migdal sebagai kerangka utama, teori patron-klien James Scott sebagai alat bantu analisis hubungan, dan konsep patronase & klientelisme sebagai penjelas bentuk transaksinya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik politik patronase membentuk relasi kuasa antara Elin Herlina dan para *local strongman* dalam Pilkades Cikoneng. Oleh karenanya, penggunaan teori James C. Scott dan konsep Migdal tidak bertentangan jika digunakan dalam satu penelitian, karena akan saling melengkapi dalam membaca struktur relasi kuasa dan patronase yang terjadi dalam politik desa di Cikoneng.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik politik patronase dijalankan dalam konteks politik lokal di tingkat desa, khususnya melalui relasi kuasa antara calon kepala desa dan elite lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap peran *local strongman* dalam mendukung Elin Herlina serta bagaimana hubungan patron-klien

dan praktik klientelisme membentuk dinamika kekuasaan dalam proses dan hasil Pilkadaes di Desa Cikoneng tahun 2021.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

